



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERATURAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PER-BRSDM/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN RISET DAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-BRSDM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 8/PER-BRSDM/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PER-BRSDM/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Mengubah Lampiran I, II, III dan IV yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-BRSDM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 8/PER-
BRSDM/2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN RISET DAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan ke empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. RPJPN ini menjadi panduan dalam memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ke tujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu *“Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”*. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) dengan pendapatan nasional

bruto atau *gross national income* di antara US\$ 4.046 hingga US\$ 12.535 per tahun, yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) tahun 2020-2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BPPSDM sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BPPSDM yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM.

Peran strategis BPPSDM meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien dan tepat sasaran; 5) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha KP; 6) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 7) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 8) mewujudkan tata kelola SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 9) Meningkatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP melalui penerimaan peserta didik, pelatihan masyarakat, dan pemanfaatan aset; serta 10) Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara/ASN berbasis *knowledge management*, sebagai mandat kebijakan dan perubahan paradigma pengembangan kompetensi ASN.

Tugas dan fungsi BPPSDM sebagai penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program penyuluhan dan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BPPSDM dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

BPPSDM menetapkan perubahan Renstra sebagai tindak lanjut implementasi amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang memuat peleburan berbagai lembaga serta tugas dan fungsi riset ke dalam BRIN sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan.

Perubahan kelembagaan ini memerlukan reformulasi arah kebijakan dan sasaran strategis yang berfokus pada memperkuat SDM berkualitas dan berdaya saing, untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan pada Renstra BPPSDM tahun 2020-2024 perlu disesuaikan dengan adanya perubahan arah kebijakan BPPSDM 2023 dalam mendukung kebijakan pembangunan KP dan arah kebijakan KKP melalui penyediaan SDM kompeten dan mewujudkan pelaku utama mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya KP. Arah kebijakan menetapkan agenda prioritas dalam rangka pemulihan kesehatan laut serta percepatan pertumbuhan ekonomi kelautan berkelanjutan dengan lima strategi kebijakan 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut, 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, 3) Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, 4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 5) Pembersihan Sampah Plastik, melalui Gerakan partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut. Kunci keberhasilan penerapan ekonomi biru (*blue economy*) dimaksud adalah ketersediaan SDM Unggul yang akan didukung melalui strategi sinergi kegiatan BPPSDM dalam bentuk *Vocational Goes to Actor* (VOGA), yang terdiri dari *Smart Fisheries Village* (SFV atau Desa Perikanan Cerdas), *Ocean Institute of Indonesia* (OII) dan sertifikasi kelautan dan perikanan.

BPPSDM berkomitmen untuk melakukan dukungan kegiatan penyuluhan terhadap program prioritas KKP melalui pendampingan oleh penyuluh perikanan pada program prioritas KKP, penyiapan *road map* penyuluhan tahun 2024-2029, penguatan sistem informasi penyuluhan reviu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait penyuluhan dan penguatan penguasaan metodologi penyuluhan untuk penyuluh perikanan.

BPPSDM mengembangkan program SFV di beberapa wilayah di Indonesia untuk mendukung program prioritas KKP berbasis ekonomi biru. Program SFV dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi BPPSDM di masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya mengolaborasikan seluruh konsep, tugas dan fungsi BPPSDM dari pendidikan melalui kegiatan *teaching factory* (TEFA), pelatihan, penyuluhan, sertifikasi serta penerapan inovasi, teknologi dan digitalisasi.

SFV merupakan konsep pembangunan desa berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaan sehingga daya saing desa dan kapasitas SDM meningkat. Melalui program ini, BPPSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

BPPSDM merancang pembentukan OII dengan tujuan untuk membenahi sumber daya manusia melalui transformasi pendidikan KP. Transformasi pendidikan KP menjadi OII dilakukan dengan mengintegrasikan program studi yang berbasis keilmuan dan teknologi serta berbasis vokasi sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kurikulum serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui optimalisasi kualitas manajemen dan penjaminan mutu kelembagaan.

Selain itu, BPPSDM melakukan transformasi pelatihan melalui pengembangan 1) sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), ujian dan sertifikasi Awak Kapal Perikanan/AKP), 2) sistem penyelenggaraan diklat, ujian dan sertifikasi teknis KP dan 3) optimalisasi pengembangan kompetensi ASN melalui *corporate university*, dan 4) penyusunan *grand design* pelatihan vokasi untuk sektor KP.

B. Kondisi Umum

1. Bidang Penyuluhan KP

Jumlah kelompok yang disuluh pada Tahun 2020 sebanyak 47.754 kelompok, di mana sebanyak 1.597 kelompok meningkat kelasnya, dan pada tahun 2021 sebanyak 47.378 kelompok dengan kelompok yang meningkat kelasnya sebanyak 1.794.kelompok. Pada tahun 2022 terdapat 47.181 kelompok yang disuluh dengan 1.972 kelompok yang meningkat kelas. Tahun 2023 sebanyak 47.612 kelompok yang disuluh dengan 2.047 kelompok meningkat kelas. Sebaran jumlah kelompok yang disuluh pada periode tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kelompok yang Disuluh dan Ditingkatkan Kelasnya Tahun 2020 - 2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok yang disuluh	47.754	47.378	47.181	47.612
Kelompok yang meningkat kelas	1.597	1.794	1.972	2.047

Sumber: Laporan Kinerja (LKj) BPPSDM 2020-2023.

2. Bidang Pendidikan KP

Jumlah peserta didik di satuan pendidikan lingkup BPPSDM pada tahun 2020-2003 mengalami peningkatan 33 orang atau sekitar 0,4%. Kecilnya peningkatan jumlah peserta didik dikarenakan adanya satuan pendidikan menengah yang sudah tidak menerima peserta didik yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak dan Sorong, setelah setahun sebelumnya SUPM Kupang dan SUPM Bone yang juga sudah tidak menerima peserta didik. Hal ini terjadi sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyiratkan bahwa pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam hal ini adalah SUPM berada pada Pemerintah Provinsi. Upaya yang dilakukan KKP untuk meningkatkan jumlah peserta didik dengan menginisiasi rintisan Politeknik KP baru (Politeknik KP Aceh, Pariaman, Maluku) yang berasal dari SUPM Ladong, Pariaman, dan Waiheru, setelah sebelumnya didirikan beberapa Politeknik Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Karawang, Kupang, Bone, Jembrana, Pangandaran, serta Akademi Komunitas KP Wakatobi.

Dampak dari penutupan 4 (empat) SUPM tersebut berpengaruh juga terhadap persentase jumlah lulusan peserta didik mengalami penurunan sebesar 5% dari tahun 2020-2023 sehingga jumlah lulusan pendidikan yang dapat diserap dunia kerja KP pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 2,7%, akan tetapi jumlah lulusan yang berwirausaha mengalami peningkatan sebanyak 38,4%. Sebaran jumlah peserta didik, lulusan dan lulusan yang diserap dunia kerja disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Peserta Didik, Lulusan dan Lulusan yang Diserap Dunia Kerja Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Jumlah peserta didik	8.259	8.440	8.773	8.292
Jumlah lulusan	2.538	2.420	2.561	2.407
Jumlah lulusan yang diserap dunia kerja	1.792	1.839	1.923	1.743
Jumlah lulusan yang berwirausaha	198	275	270	274

Sumber: LKj Pusat Pendidikan KP 2020-2023

3. Bidang Pelatihan KP

Dalam rangka pengembangan kompetensi SDM, kegiatan pelatihan diarahkan bagi peningkatan kompetensi masyarakat dan aparatur KKP. Jumlah lulusan pelatihan masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 34.518 orang dan jumlah lulusan pelatihan aparatur sebanyak 5.716 orang pada tahun 2023. Jumlah total pelatihan masyarakat dan aparatur tahun 2023 meningkat sebesar 116,1 % dibandingkan tahun 2022. Sebaran jumlah lulusan pelatihan pada tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Lulusan Pelatihan Tahun 2015-2019

Jumlah lulusan pelatihan	2020	2021	2022	2023
Masyarakat	12.120	15.035	29.098	34.518
Aparatur	8.676	4.986	5.530	5.716
Total	20.796	20.291	34.628	40.234

Sumber: LKj BPPSDM 2020-2023

Capaian BPPSDM dalam Pembangunan SDM KP tahun 2020-2023, antara lain:

1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pada tahun 2020 mencapai sebesar 54,82 % dan tahun 2023 mencapai 74,17%. Capaian tersebut dihasilkan dari perhitungan perbandingan lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan masyarakat yang bekerja di bidang KP dengan lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan masyarakat. Di mana jumlah lulusan pendidikan vokasi KP yang bekerja di bidang KP yang dihitung lulusan pada tahun berjalan dengan masa tunggu 6 (enam) bulan dan atau tahun sebelumnya dan jumlah masyarakat KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya dan/atau bekerja di DUDI yang dihitung melalui evaluasi setelah pelatihan;
2. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPPSDM tercapai sebesar Rp. 32,056 Miliar di tahun 2023. Capaian ini didapatkan dari kontribusi BPPSDM yang membentuk satker Badan Layanan Umum (BLU);
3. Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) tercapai sebesar 225 orang Pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 418 pada tahun 2023;
4. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk sebesar 3.437 orang pada tahun 2020 dan pada tahun 2023 tercapai sebesar 3.758 orang. Pembentukan kelompok ditandai dengan penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota;
5. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya pada tahun 2020 sebesar 1.597 dan meningkat di setiap tahunnya menjadi 2.047 pada tahun 2023;
6. Tenaga kerja yang terlibat lingkup BPPSDM baru muncul di tahun 2022, dengan capaian sebesar 15.221 orang dan 12.519 orang pada tahun 2023. Terjadi penurunan sebesar 17,75% dikarenakan pengurangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah aktif pada tahun 2023;
7. Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa Perikanan Cerdas) sebanyak 11 desa tahun 2020, dan pada tahun 2023 tercapai 10 desa. Desa mitra mulai tahun 2022 dikembangkan

menjadi *Smart Fisheries Village* atau Desa Perikanan Cerdas, merupakan program yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPPSDM untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan. SFV juga merupakan model pengembangan desa perikanan pintar secara terintegrasi dengan berkolaborasi bersama banyak pihak terkait yaitu pemerintah pusat dan daerah, akademisi, industri, serta masyarakat. SMART sendiri merupakan singkatan dari *Sustainable, Modernization, Acceleration, Regeneration, dan Technology*, sehingga melalui program ini diharapkan akan terbentuk desa-desa perikanan unggulan yang produktif, mampu menerapkan teknologi informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip keberlanjutan;

8. Sarana dan Prasarana Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebesar 44 capaian pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 38 unit. Indikator ini baru muncul tahun 2022 dan bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDM dalam mendukung produktivitas sektor KP melalui pelaksanaan kebijakan SDM yang efektif dan kualitas pelaksanaan pengajaran di satuan Pendidikan KP;
9. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM capaian tahun 2020 sebanyak 8 unit dan meningkat sampai tahun 2023 sebesar 16 unit yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
10. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI atas Laporan Keuangan (LK) BPPSDM capaian sebesar 0,025% meningkat sampai pada tahun 2023 sebesar 0,003%;
11. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM sebesar 77,88 pada tahun 2020 dan meningkat sampai tahun 2023 sebesar 86,12. Indikator ini dihitung berdasarkan penyesuaian bobot kualifikasi, bobot kompetensi, bobot kinerja, bibit disiplin IP ASN;
12. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM sebesar 87,93 pada tahun 2022, dan 84,33 pada tahun 2023;
13. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM sebesar 3 pada tahun 2020, dan sebesar meningkat sampai tahun 2023 sebesar 3,8;
14. Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar. Capaian pada tahun 2020 sebesar 98,84% dan meningkat sampai tahun 2023 capaiannya sebesar 116,55%;
15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM. Capaian sebesar 84,09% pada tahun 2022 dan meningkat sampai tahun 2023 sebesar 86,26%;
16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM. Capaian pada tahun 2023 sebesar 81,52%. Capaian indikator kinerja ini diukur menggunakan formula proposal inovasi yang masuk ke dalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 75, persentase capaian diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata jumlah proposal yang diusulkan dikalikan dengan 100;
17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM. Capaian pada tahun 2020 sebesar 95,55 dan pada tahun 2023 sebesar 94,05;

18. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDM mencapai 93,41 pada tahun 2020 dan pada tahun 2023 mencapai 92,77;
19. Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) BPPSDM mencapai 77,5% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 90% pada tahun 2023;
20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM mencapai 75,40% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 88% pada tahun 2023;
21. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mencapai 5.214 orang dan meningkat sampai tahun 2023 sebesar 5.996 orang. Perhitungan indikator ini dari aparatur yang diberikan beasiswa, ijin belajar, dan pelatihan aparatur KKP.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran penyuluh sebagai *center of excellence*, *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of empowerment* (agen pemberdayaan) mendukung pencapaian tujuan program KKP dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pelayanan pada masyarakat, termasuk melakukan transformasi budaya sebagai salah satu pilar poros maritim. Penyuluh memiliki tugas untuk menyampaikan hasil penelitian dan pelatihan kepada pelaku utama, mampu memerangi kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, degradasi lingkungan pesisir dan laut, meningkatkan produktivitas perikanan, memperluas akses permodalan, serta meningkatkan kualitas SDM pelaku utama perikanan. Peran strategis tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendampingan Kelompok, penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok, pendampingan Bantuan Pemerintah, Pendirian Koperasi, legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) Sosialisasi peraturan perundang-undangan perikanan, pendampingan dan Penyuluhan di 12 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Pendataan Pelaku Usaha KP untuk penerbitan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) dan *sampling* produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar dan petambak garam) dalam Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Pengusulan dan Pemanfaatan Bale Kusuka sebagai sarana informasi pembangunan KP dan penyuluhan pelaku utama.

Pengembangan SDM di bidang pendidikan didukung dengan peserta didik yang seluruhnya berasal dari anak pelaku utama yang tersebar pada 16 satuan pendidikan, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Politeknik KP dan 1 (satu) Akademi Komunitas merupakan pendidikan vokasi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, mencakup program pendidikan Diploma I (D1), Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4) serta pasca sarjana terapan dengan program studi unggulan meliputi Agribisnis KP, Budidaya Air Payau, Kapal Perikanan, Penangkapan Ikan, Pengolahan Ikan, Perikanan Air Payau,

Budidaya Laut, Kelautan, dan Wisata Bahari. Sedangkan satuan Pendidikan Menengah yang terdiri dari 5 (Lima) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dengan program studi unggulan Nautika Penangkapan Ikan, Budidaya Air Tawar, Budidaya Air Payau, Budidaya Laut, dan Pengolahan Perikanan. Seluruh kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan *teaching factory* sehingga dengan kegiatan pendidikan yang lebih mengedepankan praktik dibandingkan teori mampu menghasilkan lulusan pendidikan telah dilengkapi dengan sertifikasi berbagai bidang keahlian.

Peran dan fungsi pelatihan menjadi penting dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024. Penyelenggaraan pelatihan didukung dengan keberadaan 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung dan Ambon; 1 (satu) Balai Pendidikan dan Pelatihan/Diklat Aparatur (BDA) di Sukamandi; 223 Pusat Pelatihan Perikanan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), dan 137 Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah tenaga pelatih terdiri atas 34 orang widyaiswara dan 86 orang instruktur. Pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), pembangunan wilayah perbatasan, Pengarusutamaan Gender (PUG), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); pengembangan usaha mina pedesaan, Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan program peningkatan kompetensi di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), pendampingan program bantuan pemerintah dibidang penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, pengawasan dan konservasi, serta peningkatan kompetensi bagi ASN lingkup KKP, pelatihan pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* mengenai *International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) Regional Training for Investigators and Prosecutors for African Countries*. Pelatihan ini diikuti peserta dari Indonesia dan 5 negara Afrika, yaitu Tanzania, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, dan Namibia. Pelatihan internasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang kelautan, perikanan, dan keamanan maritim bagi 10 negara Afrika dan Timur Tengah, yaitu Afrika Selatan, Aljazair, Madagaskar, Maroko, Mauritius, Mesir, Nambia, Sudan, Tanzania, Tunisia, serta 4 negara Asia Pasifik (Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Timor Leste). Penyelenggaraan pelatihan yang bertaraf internasional, sesuai konvensi STCW-F (*International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel*) 1995 yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization (IMO)* mengenai Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan bagi Pelaut Kapal Penangkap Ikan, mencakup pelatihan terkait: Diklat Keselamatan Dasar Pelaut Kapal Penangkap Ikan (*Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel*), Diklat Lanjutan Penanggulangan Kebakaran (*Advanced Fire Fighting*), Diklat Ketrampilan Pertolongan Medis Darurat (*Medical Emergency First Aid*), Diklat Ketrampilan Perawatan Medis di atas Kapal (*Medical Care on Board*), Diklat Ketrampilan Operator Radio Umum untuk GMDSS (*General Radio Operator Certificate/ GOC for the Global Maritime Distress Safety System*), Diklat Ketrampilan Operator Radio Terbatas untuk GMDSS (*Restricted Radio Operator Certificate/ ROC for the GMDSS*), Diklat Kecakapan Pesawat Luput Maut dan Skoci Penyelamat (*Proficiency in Survival Craft and*

Rescue Boats), Diklat *International Maritime Organization (IMO) model course 3.12* dan *6.09* untuk Pelatih dan Penguji (target sasaran peserta diklat adalah guru, dosen, widyaiswara dan instruktur) dan Diklat *IMO model course 6.10* untuk simulator, Diklat syahbandar perikanan dan Diklat tatalaksana kesyahbandaran bagi pembantu syahbandar perikanan.

2. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyuluhan pendidikan dan pelatihan adalah kualitas SDM karena SDM yang berkualitas dan adaptif menjadi kunci agar SDM mampu bersaing dipasar global yang semakin kompetitif.

Tantangan yang terkait penyuluhan saat ini adalah pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pasca terbitnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2016 yang menyebabkan garis koordinasi antara penyuluh dengan BPPSDM terlalu panjang sehingga kinerja penyuluh masih belum maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek terkait kelembagaan penyuluhan perikanan yang belum berjalan optimal, legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia, kualitas dan kuantitas penyuluh masih belum memadai, sarana dan prasarana penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh serta pembiayaan penyuluhan masih terbatas.

Tantangan yang terkait pendidikan berkaitan dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 tercantum bahwa urusan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga beberapa SUPM resmi dialihkan statusnya menjadi Politeknik KP yang merupakan satuan Pendidikan Vokasi sehingga diperlukan penyusunan kurikulum dan program akademik yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan kompetensi kerja lulusan sesuai dengan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang dibutuhkan oleh dunia usaha/dunia industri.

Peningkatan kualitas SDM perikanan, standar keamanan, keselamatan dan perlindungan bagi SDM perikanan Indonesia adalah target ratifikasi STCW-F sehingga perlu dilakukan persiapan ratifikasi dan segera diimplementasikan agar SDM Indonesia mampu bersaing secara global. Kemampuan pelaut Indonesia yang telah mendunia belum diikuti dengan kepemilikan sertifikat kompetensi sehingga diperlukan peningkatan kualitas Anak Buah Kapal (ABK) melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi personil yang dipekerjakan di kapal penangkap ikan dan peningkatan standar pelatihan dan keselamatan di industri perikanan dan armada kapal penangkap ikan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan kehidupan dan properti di laut dalam industri perikanan.

D. Lingkungan Strategis

BPPSDM memiliki mandat untuk penyiapan sumber daya manusia KP yang kompeten melalui penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, serta pelatihan yang dilakukan terpadu dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mandat tersebut harus diikuti penyusunan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan sektor KP di Indonesia melalui pengembangan SDM yang kompeten.

Lingkungan strategis ini secara teoritis dapat diartikan sebagai situasi strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan BPPSDM tahun 2020-2024. Situasi strategis bersumber dari faktor internal (*Internal Factor Strategic*) dan eksternal (*External Factor Strategic*) yang bersifat statis maupun dinamis yang tercakup dalam perspektif wilayah (sektoral, regional, nasional, dan global).

Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal dan eksternal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu kapasitas sumber daya manusia terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan.

Faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

- a. memiliki SDM (penyuluh, guru/dosen, instruktur, widyaiswara, assesor dan staf pendukung) yang kompeten;
- b. adanya peraturan perundangan terkait penyuluhan, pendidikan dan pelatihan;
- c. kemampuan untuk menjaring kerja sama riset dalam dan luar negeri;
- d. kemampuan menghasilkan inovasi IPTEK yang sesuai kebutuhan;
- e. menghasilkan lulusan diklat vokasi yang dibekali sertifikat kompetensi;
- f. produk Sertifikasi Kompetensi yang sudah diakui oleh DUDI;
- g. kemampuan menyelenggarakan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terpadu; dan
- h. kelembagaan pendidikan dan pelatihan yang sudah terakreditasi dan bersertifikat *International Organization for Standardization* (ISO) 9001: 2015.

Faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kelemahan antara lain :

- a. sarana prasarana penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan yang tersedia masih memerlukan revitalisasi;
- b. rasio pelaku utama/usaha terhadap jumlah penyuluh dan penyebarannya belum memadai;
- c. peran penyuluh dalam mendampingi pelaksanaan program pembangunan KP belum optimal;
- d. dunia industri belum sepenuhnya memberikan pengakuan terhadap kompetensi SDM; dan
- e. kurikulum pendidikan belum memenuhi kebutuhan DUDI.

Faktor strategis lingkungan eksternal yang menjadi peluang antara lain:

- a. kemajuan IPTEK untuk pengembangan inovasi KP;
- b. era Industri 4.0 dan *Society* 5.0;
- c. SDM unggul dan berdaya saing sebagai prioritas kebijakan pembangunan nasional;
- d. Jejaring SDM di seluruh wilayah Indonesia;
- e. sumber daya Kelautan dan Perikanan masih dapat dioptimalkan; dan
- f. kerja sama lintas sektoral dan lembaga terkait penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

Faktor strategis lingkungan eksternal yang menjadi ancaman antara lain:

- a. persaingan dengan tenaga kerja dari luar negeri di era perdagangan bebas, dan
- b. adanya persyaratan kompetensi bagi tenaga kerja kelautan dan perikanan yang tersertifikasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan (KP) yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

B. Misi

Misi BPPSDM adalah menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, KKP mendukung 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

C. Tujuan

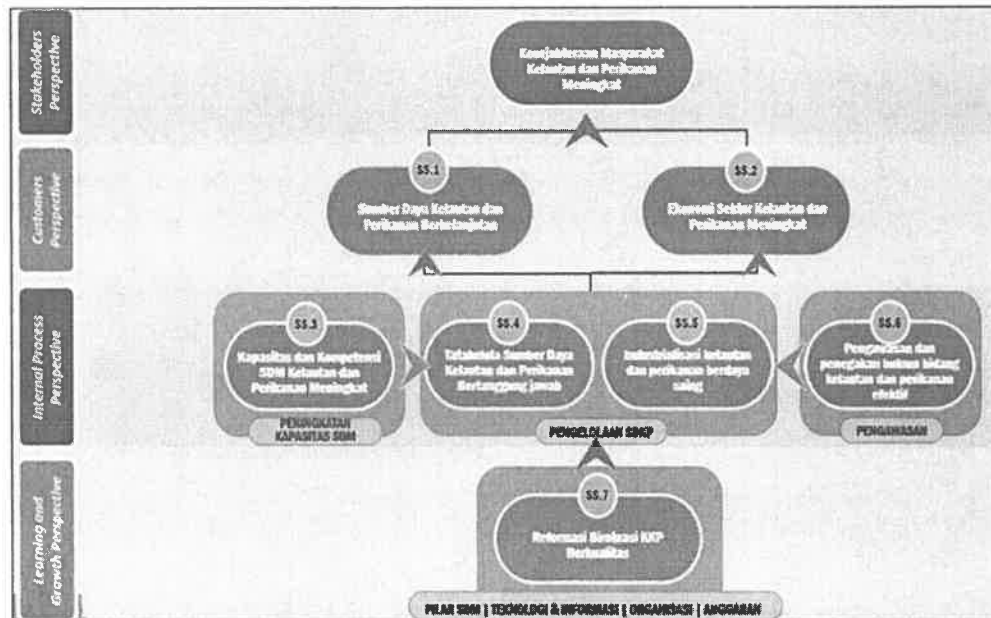
Dalam rangka menjabarkan misi “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” maka tujuan yang ingin dicapai BPPSDM adalah mewujudkan:

1. SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing; dan
4. Tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan BPPSDM.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-3 “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat” dan SS-7 “Reformasi Birokrasi (RB) KKP yang berkualitas”. Sasaran program pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan.

Dalam penyusunan Peta Strategis, KKP menggunakan prinsip *Balanced Score Card* (BSC) melalui empat strategi/perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, serta *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategis sebagai berikut:



Seluruh sasaran program beserta indikator BPPSDM bertujuan untuk mendukung sasaran strategis KKP tahun 2020-2024 yaitu Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan KP yang meningkat. Adapun dukungan BPPSDM pada setiap Sasaran Strategis (SS) adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis ketiga SS-3 yang akan dicapai yaitu “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan sasaran program dan indikator kinerja program:

SP-1 : SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

IKP-1 : Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (%)

SP-2 SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk *Start Up* (Usaha Rintisan)

IKP-1 : Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk *start up* (usaha rintisan) (orang)

SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan

IKP-1 : Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk (kelompok)

IKP-2 : Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (kelompok)

- SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
IKP-1 : Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village/SFV*) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kelautan dan Perikanan
- SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
IKP-1 : Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit))
- SP-6 Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan
IKP-1 : Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)
- SP-7 Tata kelola pemerintahan yang baik Lingkup BPPSDM
IKP-1 : Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM (unit)
IKP-2 : Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan (LK) BPPSDM (%)
IKP-3 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BPPSDM (indeks)
IKP-4 : Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPPSDM (nilai)
IKP-5 : Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (nilai)
IKP-6 : Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
IKP-7 : Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)
IKP-8 : Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM (%)
IKP-9 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM (nilai)
IKP-10 : Nilai Kinerja Anggaran BPPSDM (nilai)
IKP-11 : Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) BPPSDM (%)
IKP-12 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPSDM (%)
IKP-13 : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (orang)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “pengelolaan perikanan bertujuan agar tercapainya manfaat secara optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan”. Pencapaian tujuan pembangunan itu dilaksanakan dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan dengan terencana. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dijadikan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Fokus RPJMN periode IV (2020-2024) dalam siklus RPJPN 2005-2025 adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut diprioritaskan untuk memperkuat struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terganggunya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan menurunnya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk di dalamnya sektor kelautan dan perikanan. Keadaan ini memerlukan pengendalian yang lebih komprehensif dan perlu adanya orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021, yang ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, sesuai dengan tema RKP pada tahun 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. membangun revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukhankam) serta transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional. Selain itu KKP juga mendukung *major project* lainnya antara lain terkait dengan pariwisata dan Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan instansi lain yang terkait serta dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara/BUMN/Swasta). Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP antara lain adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, memperkuat komitmen pelaksanaan target SDG 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); dan
3. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang terkait Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan (KP), adalah penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) juga menerapkan reformasi birokrasi yang berkualitas yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BPPSDM. Di samping itu, perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program BPPSDM secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan pelayanan kepada Masyarakat tersebut salah satunya dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu prinsip BLU adalah menghasilkan barang/jasa tanpa mengutamakan pencarian keuntungan melalui suatu fleksibilitas pengelolaan keuangan dan keleluasaan menerapkan praktik bisnis yang sehat. BPPSDM juga melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-

2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Pelaksanaan kelima arah kebijakan KKP tersebut diperkuat dengan Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan melalui penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama (APU) sebanyak 100% dan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui *single institute* yaitu *Ocean Institute of Indonesia* (OII) yang mengedepankan fleksibilitas dan inovasi pendidikan yang didukung penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan Bersama

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun juga dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) KKP. Peningkatan penerimaan PNBP pada periode tahun 2015-2019 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

Pengarusutamaan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan, terdiri dari:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/*Goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;

- c. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- d. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- e. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- f. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- g. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan;
- h. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan;
- i. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- j. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

2. Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup:

Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat.

Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

- a. penyiapan *road map* PUG,
- b. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah,
- c. pembuatan profil gender,
- d. monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender KKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah:

- a. pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati;

- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

C. Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM pada periode 2021-2024 diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

1. Penyuluhan KP

Kegiatan penyuluhan didasarkan pada metode dan materi penyuluhan yang partisipatif dan inovatif dilaksanakan melalui:

- a) peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok);
- b) peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM dan Koperasi);
- c) peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan; dan
- d) peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Penataan penyelenggaraan penyuluhan, terutama pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana kewenangan penyelenggaraan penyuluhan menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan fokus kepada ketenagaan, kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan, meliputi:

- a. pengembangan dan penataan kelembagaan dan ketenagaan yang terdiri dari peningkatan kelas kelompok mandiri dan percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah;

- b. peningkatan kapasitas penyuluh yang terdiri dari peningkatan daya saing penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengembangan dan pembinaan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB);
- c. pengembangan penyelenggaraan penyuluhan berbasis digital yang terdiri dari pengembangan materi *cyber extention*, peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan teknologi dan pengembangan penyuluhan wilayah potensi perikanan (*mapping*);
- d. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana penyuluhan yang terdiri dari penataan sarana dan prasarana penyuluhan, pengelolaan Balai/Pos/Satker penyuluhan dan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
- e. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyuluhan yang terdiri dari pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja, peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh dan pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi.

2. Pendidikan KP

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pendidikan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, dan kelembagaan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan.

Arah pendidikan KP yang dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. penerimaan peserta didik baru dari anak pelaku utama kelautan dan perikanan sebanyak 100% (seratus persen) di satuan Pendidikan kelautan dan perikanan;
- b. peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan *Teaching Factory* dibidang kelautan dan perikanan;
- c. pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;
- e. meningkatkan kerja sama pendidikan dengan lembaga lain;
- f. peningkatan kualitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pengembangan Desa Perikanan Cerdas (*Smart Fisheries Village/SFV*) yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kelautan dan perikanan melalui pengabdian masyarakat; dan
- h. pengembangan inovasi teknologi terapan melalui *Project Based Learning*.

Penataan kelembagaan pendidikan, merupakan langkah KKP memenuhi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, di mana kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah menjadi kewenangan daerah. Sehingga sejak tahun 2019, proses penataan Lembaga Sekolah Usaha Perikanan Menengah sudah dimulai. Penataan kelembagaan akan dilakukan dengan 3 model, yaitu:

- a. peningkatan kelembagaan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) menjadi Politeknik KP (SUPM Ladong, Pariaman, Kotaagung, Tegal, Maluku);
- b. penggabungan SUPM dengan Politeknik KP (SUPM Bone dan Kupang);

- c. perubahan kelembagaan SUPM menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan/BP3 (SUPM Pontianak dan Sorong).

Selain itu, penataan kelembagaan juga dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan bagi putra/putri pelaku utama memperoleh kesempatan Pendidikan lebih besar. Hal tersebut dilakukan dengan membuka pendidikan tinggi baru seperti Politeknik KP Wakatobi, Akademi Komunitas KP Morotai, Akademi Komunitas KP Parigi Moutong, serta wilayah lain yang sekaligus mendukung program KP lainnya.

3. Pelatihan KP

Pelatihan kelautan dan perikanan diselenggarakan melalui pelatihan bagi masyarakat dan aparatur. Pelatihan bagi masyarakat ditujukan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Sedangkan diklat bagi aparatur ditujukan bagi aparatur negara yang memiliki peran, partisipasi dan kontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan, baik aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun aparatur di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Diklat aparatur terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan, yaitu diklat manajerial, teknis, dan *blended* kultural

Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi peningkatan kompetensi masyarakat KP agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha dan taraf kehidupannya. Pelatihan bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dan aparatur daerah yang membidangi kelautan dan perikanan, ditujukan untuk menyiapkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial, serta sebagai fasilitator bagi kepentingan para pelaku utama. Arah pelatihan KP yang dilaksanakan antara lain :

- a. mengembangkan Sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F) 1995;
- b. melakukan akreditasi program pelatihan KP;
- c. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP;
- d. mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan;
- e. mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan pendidikan bisnis berbasis *digital talent* untuk menghasilkan *start up* di bidang kelautan dan perikanan;
- f. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (*online* pendidikan); dan
- g. mengembangkan penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Dukungan BPPSDM Terhadap Arah Kebijakan KKP

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan memberi pemasukan lebih optimal bagi keuangan negara dari sektor kelautan dan perikanan, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2020-2024 memiliki agenda prioritas dengan 5 (lima) kebijakan, yaitu:

1. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan yang dilakukan dengan cara memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan

sampai ZEEI dan laut lepas, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan. Kebijakan tersebut didukung dengan kegiatan :

- a. penyelenggaraan program pelatihan syahbandar, enumerator, pengawas perikanan, dan operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP);
 - b. fasilitasi penyelenggaraan proses ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan; dan
 - c. pengembangan metode pelatihan dengan pendekatan pendidikan bisnis berbasis *digital talent* untuk menghasilkan *start up* di bidang kelautan dan perikanan (pemagangan) di lokasi pengembangan kampung perikanan.
2. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan dan memperkuat tata kelola perikanan budi daya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat. Kebijakan tersebut didukung dengan kegiatan :
- a. peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan *Teaching Factory* di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (*online*); dan
 - c. peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan.
3. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, peningkatan nilai tambah serta pengelolaan sistem logistik yang efisien untuk meningkatkan investasi, perluasan pasar dalam negeri dan ekspor hasil kelautan dan perikanan. Kebijakan tersebut didukung dengan kegiatan :
- a. peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok);
 - b. peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM dan Koperasi);
 - c. peningkatan koordinasi pembinaan Koperasi Usaha Bersama (KUB) antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan KUB menjadi lembaga yang berbadan hukum dalam bentuk koperasi;
 - e. fasilitasi pembentukan korporasi nelayan;
 - f. pendampingan oleh Penyuluh Perikanan kepada kelompok pelaku utama/usaha pada budidaya KP;
 - g. penguatan sarana prasarana penyuluh KP;
 - h. pembentukan korporasi pembudidaya lobster, kepiting dan rajungan;
 - i. peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok);
 - j. peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi); dan
 - k. Memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya dalam hal kelembagaan,

4. Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui perluasan kawasan konservasi perairan, penyelenggaraan penataan ruang laut, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, rehabilitasi pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di pesisir dan laut, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kebijakan tersebut didukung dengan kegiatan:
 - a. penyelenggaraan program pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia / Skema Kompetensi Kerja Khusus (SKKNI/SK3) & Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995 (Ahli Nautika Penangkapan Ikan/ANKAPIN dan Ahli Teknik Penangkapan Ikan/ATKAPIN I, II, III, Rating dan Sertifikasi Kecakapan Nelayan/SKN);
 - b. mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan;
 - c. memanfaatkan teknologi informasi dan media digital dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (*online*) di sentra budidaya perikanan;
 - d. penguatan sarana prasarana pelatihan;
 - e. penumbuhan wirausaha baru dibidang budidaya perikanan melalui pemagangan (inkubator bisnis);
 - f. peningkatan kolaborasi penyuluhan dengan pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan hasil kaji widya kepada pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan melalui metode penyelenggaraan penyuluhan perikanan; dan
 - g. pengabdian kepada Masyarakat yang difokuskan pada kampung-kampung Tematik Perikanan melalui kegiatan pengabdian pendidikan sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
5. Penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kebijakan tersebut didukung dengan kegiatan :
 - a. fasilitasi pendidikan kepada 100% anak pelaku utama kelautan dan perikanan;
 - b. akreditasi/pengesahan (*approval*) program dan pendidikan pelatihan KP;
 - c. pengembangan lulusan satuan pendidikan dengan kualifikasi Diploma-4 (D4) Jurusan Budidaya yang melakukan rintisan wirausaha di bidang tambak;
 - d. pengembangan lulusan satuan pendidikan dengan kualifikasi D4 Jurusan Budidaya yang melakukan rintisan wirausaha di bidang budidaya lobster;
 - e. pengembangan lulusan satuan pendidikan dengan kualifikasi D4 Jurusan Budidaya yang melakukan rintisan wirausaha di bidang budidaya kepiting dan rajungan;
 - f. mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM KP berbasis SKKNI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta SK3 di bidang budidaya perikanan; dan
 - g. menyelenggarakan program pelatihan dalam rangka mendukung PNBK perikanan, yaitu Pelatihan di bidang kepelautan perikanan untuk mendapatkan sertifikat keahlian dan keterampilan pelaut kapal penangkap ikan, pelatihan syahbandar, Pelatihan enumerator, Pelatihan pengawas perikanan, dan Pelatihan-pelatihan teknis.

Pelaksanaan arah kebijakan BPPSDM tersebut diperkuat dengan mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) KP yang unggul dan berdaya saing global, pembangunan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis digital, Pembangunan sistem penyuluhan dan pengembangan SDM serta penguatan pendampingan program KKP.

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Kegiatan prioritas penyuluhan KP pada periode 2021-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyuluhan KP yang difokuskan pada Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP, penguatan kelembagaan kelompok KP, fasilitasi UMKM untuk mendapatkan izin usaha di sektor KP, percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan dan sarana prasarana penyuluhan KP.

2. Pendidikan

Kegiatan prioritas pendidikan KP pada periode 2021-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan KP yang difokuskan pada pendidikan vokasi KP (pelantikan peserta, pengajaran dan perkuliahan, pendidikan karakter, bahan makan dan sertifikasi peserta didik), pengabdian pendidikan tinggi kepada masyarakat, akreditasi lembaga pendidikan kelautan dan perikanan (penjaminan mutu kelembagaan dan ketelusuran serapan lulusan), sertifikasi profesi dan SDM pendidikan kelautan dan perikanan (sertifikasi dosen, sertifikasi guru dan sertifikasi kompetensi); dan tata kelola kelembagaan publik bidang pendidikan KP (metode dan kurikulum, penerimaan peserta didik, wisuda, sarana dan prasarana, kelembagaan).

3. Pelatihan KP

Kegiatan prioritas pelatihan pada periode 2021-2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelatihan KP yang difokuskan pada Pelatihan Masyarakat KP, Pelatihan Teknis Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan, Pelatihan Aparatur KP (Reguler), Pelatihan Teknis Fungsional KP, Sertifikasi kompetensi Masyarakat KP dan Sarana Prasarana Pelatihan KP.

E. Kerangka Regulasi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selain mengenal kerangka anggaran, juga terdapat kerangka regulasi yang mempengaruhi kinerja pembangunan nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Renstra BPPSDM Tahun 2020-2024, memerlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi dalam Rencana Strategis BPPSDM Tahun 2020-2024, disiapkan mengacu pada program legislasi nasional dan KKP seperti tertuang dalam tabel 4.

Tabel 4. Usulan Rancangan dan Perubahan Regulasi Lingkup BPPSDM Tahun 2020-2024

No	Usulan Rancangan Permen/Kepmen KP	Usulan Perubahan dan Penyesuaian dengan Renstra KKP
2020		
1	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik KP AUP.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan
2	Rancangan Permen KP tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembekuan Ikan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Pembekuan Ikan
3	Rancangan Permen KP tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembenihan Ikan Nila	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Ikan Nila
4	Rancangan Permen KP tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Rumput Laut	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Rumput Laut
5	Rancangan Permen KP tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Ikan Kerapu	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Budidaya Ikan Kerapu
2021		
1	Rancangan Permen tentang Statuta Politeknik KP AUP.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan tanggal 8 Desember 2021
2	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
3	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
4	Rancangan Kepmen KP tentang Sentra Kekayaan Intelektual KKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Kelautan dan Perikanan
5	Rancangan Kepmen KP tentang Pejabat Penetap Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Penyuluh Perikanan Pusat serta Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Penyuluh Perikanan	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai Pusat, dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Penyuluh Perikanan Madya Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/B sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama Golongan Ruang IV/E
2022		

No	Usulan Rancangan Permen/Kepmen KP	Usulan Perubahan dan Penyesuaian dengan Renstra KKP
1	Rancangan Permen KP tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan
2	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
3	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
4	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang
5	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
6	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
7	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
8	Rancangan Permen KP tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai
9	Rancangan Kepmen KP tentang Pelepasan Jenis Ikan Baru	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelepasan Udang Galah Sijawa
2023		
1	Rancangan Permen KP tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Udang
2	Rancangan Permen KP tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
3	Rancangan Permen KP tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan
4	Rancangan Permen KP tentang Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan

No	Usulan Rancangan Permen/Kepmen KP	Usulan Perubahan dan Penyesuaian dengan Renstra KKP
		Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
5	Rancangan Permen KP tentang Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan
6	Rancangan Permen KP tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
2024		
1	Rancangan Permen KP Pelatihan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan yang Bekerja di Atas Kapal Penangkap Ikan	belum terbit
2	Rancangan Permen KP Pedoman Umum Penumbuhan Kelompok, Gabungan Kelompok Sektor Kelautan dan Perikanan	belum terbit
3	Rancangan Permen KP Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	belum terbit
4	Rancangan Permen KP Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan	belum terbit
5	Rancangan Permen KP Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	belum terbit

F. Kerangka Kelembagaan

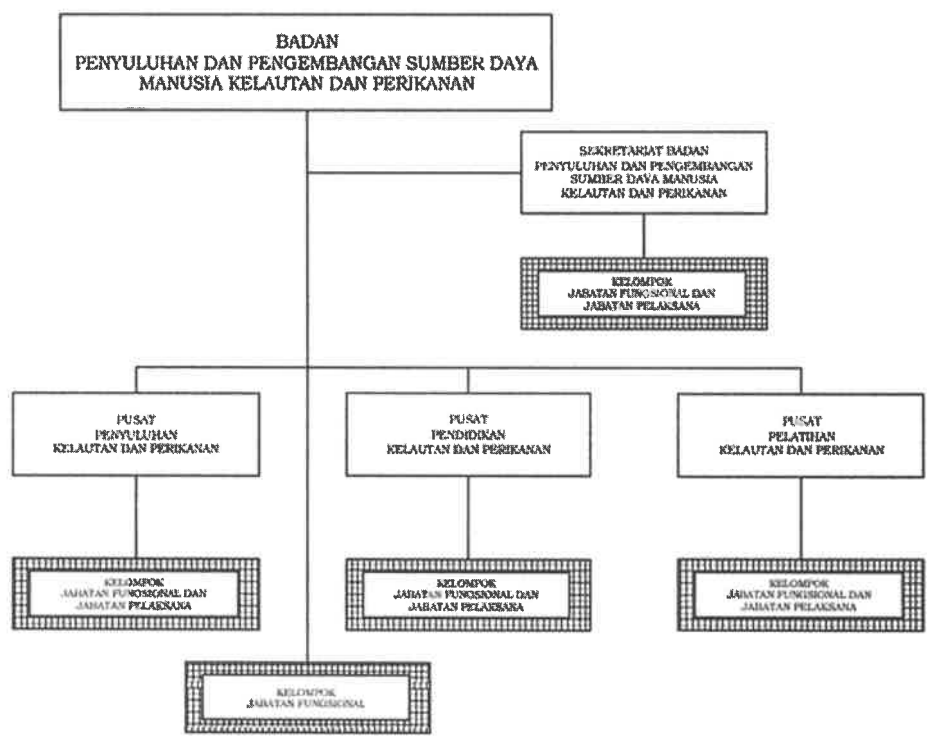
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan Kelautan dan Perikanan. Pedoman penyusunan kerangka kelembagaan BPPSDM, berpedoman pada target kinerja dan struktur kelembagaan yang ada di tingkat KKP. Penguatan kapasitas kelembagaan KKP berdasarkan Renstra KKP dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan perundang-undangan;
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Untuk melaksanakan program dan kebijakan pembangunan KKP 2020-2024 diperlukan penataan kelembagaan BPPSDM. Penataan

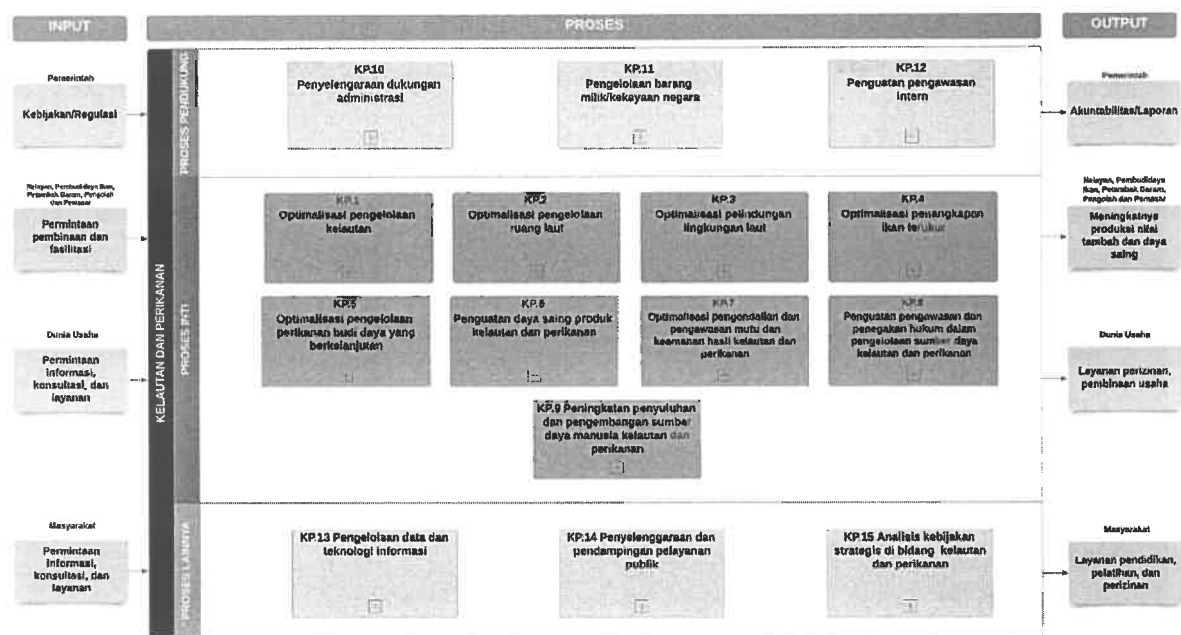
kelembagaan BPPSDM akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta amanat Presiden terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Untuk mendukung arahan presiden tersebut maka di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 43/PERMEN-KP/2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri KP tersebut diharapkan mekanisme kerja yang ada di lingkungan KKP lebih *agile* dan dapat dengan cepat menyesuaikan dinamika perubahan organisasi. Selain penataan organisasi di Tingkat Pusat, penataan juga akan dilakukan pada level kelembagaan Unit Pelaksana Teknis BPPSDM untuk melaksanakan tugas teknis operasional penyuluhan dan pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan.

Kerangka kelembagaan BPPSDM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/Permen-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM

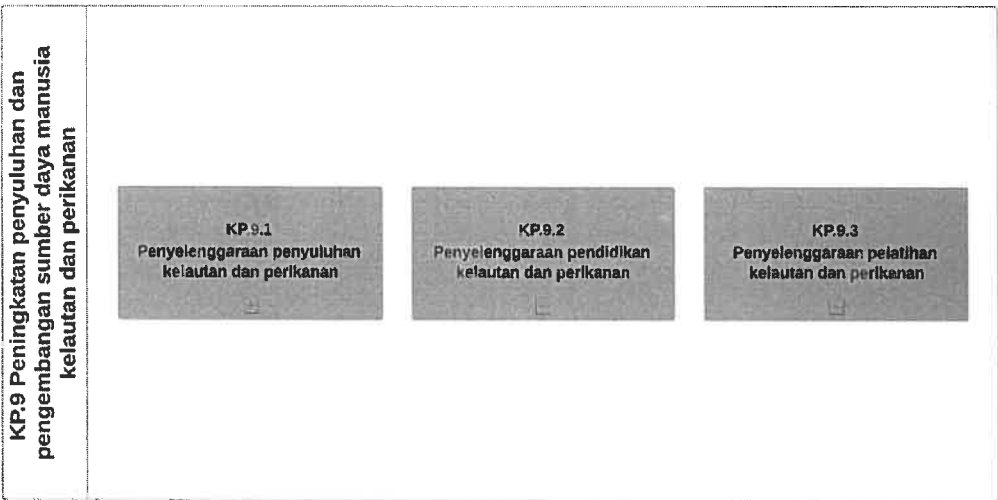
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dimandatkan untuk Menyusun Proses Bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian. Penyusunan proses bisnis tersebut dilakukan dengan menyusun proses bisnis mulai dari Level 0 (level Kementerian) sampai dengan Level 3. Untuk proses bisnis level 0 (level Kementerian) dan level 1 (level unit organisasi eselon I) ditetapkan dengan Peraturan Menteri, namun untuk proses bisnis level 2 dan level 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Adapun untuk proses bisnis level 0 sebagaimana gambar 2.



Gambar 2. Proses Bisnis KKP

Dari gambar tersebut, BPPSDM merupakan proses inti yang ke 9 dengan kegiatan utama berupa penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan. Dari proses bisnis tersebut, maka dapat dijabarkan ke dalam beberapa proses turunan yang terdiri atas:

- KP. 9.1: Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - KP. 9.2: Penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
 - KP. 9.3: Penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan
- Penjabaran tersebut sebagaimana pada gambar 3.



Gambar 3. Proses Inti BPPSDM

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP
Tahun 2020 – 2024 (Semula)

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		T A H U N				
		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Ekonomi sektor KP yang meningkat						
2	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%)	7,90	8,11	8,31	8,51	8,71
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,68	7,18	7,66	8,00
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05
SS 3. Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”						
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤64	≤67	≤72	≤76	≤80
6	Luas Kawasan konservasi (juta Ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat						
7	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	60	62	65	70	75
SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan						
8	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15
SS 6. Tatakelola SDKP yang bertanggung jawab						

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		T A H U N				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	3	5	7	9	11
10	Jumlah penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	14	24	26	26	102 (kumulatif)
11	Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
SS 7. Industrialisasi KP yang berdaya saing						
12	Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,89	29,42	31,01	32,75
13	Produksi garam rakyat (juta ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif						
14	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	54	60	65	70	75
15	Persentase penanganan pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	93	93	93	93	93
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS 9. Tatakelola pemerintahan yang baik						
16	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75
17	Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA	88	89	89	90	90

Sumber : Renstra KKP Tahun 2021 -2024

Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KKP
Tahun 2020 – 2024 (Menjadi)

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024 (semula)	2024 (menjadi)
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE							
Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat (Nilai Tukar Nelayan/NTN =108, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi =. 105 Target Tahun 2024)							
CUSTOMERS PERSPECTIVE							
SS-1. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan							
IKU.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	-	-	-	-	≤80	≤80
IKU.2	Luas kawasan konservasi perairan (Juta ha)	-	-	-	-	26,0	29,3
SS-2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat							
IKU.3	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	-	-	-	-	8,71	5-7
IKU.4	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	-	-	-	-	8,0	7,2
IKU.5	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	-	-	-	-	62,05	59,00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS-3. Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan meningkat							
IKU.6	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia Usaha dan Dunia Industri/ (DUDI) (%)	-	-	-	-	75	72
SS-4. Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab							
IKU.7	WPPNRI yang melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur (WPP)	-	-	-	-	11	11

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		TAHUN					
		2020	2021	2022	2023	2024 (semula)	2024 (menjadi)
IKU.8	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	-	-	-	-	12 (102 Kumulatif)	21
SS-5. Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing							
IKU.9	Produksi perikanan (Juta Ton)	-	-	-	-	32,75	30,85
	a. Perikanan tangkap	-	-	-	-	10,10	6
	b. Perikanan budi daya	-	-	-	-	21,58	24,85
	1) Ikan	-	-	-	-	9,48	12,52
	2) Rumput Laut	-	-	-	-	12,10	12,33
IKU.10	Produksi garam (Juta Ton)	-	-	-	-	3,4	2
IKU.11	Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	70,00
IKU.12	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP skala kecil (Triliun)	-	-	-	-	5,94	10,8
SS-6. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan							
IKU.13	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	-	-	-	-	98	98
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS-7. RB KKP yang berkualitas							
IKU.14	Nilai kinerja RB KKP (nilai)	-	-	-	-	75	80
IKU.15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (%)	-	-	-	-	90	93,76

B. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPPSDM Tahun 2020-2024

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPPSDM Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) diturunkan (*cascading*) dengan metode adopsi langsung, buat baru, komponen pembentuk ataupun lingkup dipersempit, mengacu pada Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2024. Rincian Indikator Kinerja BPPSDM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 7. Indikator Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Tahun 2020 – 2024 (semula)

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STATEGIS BRSDM	NO	IKU	SATUAN	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	SS 1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP	SS.1. Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya	Kelompok	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			2	Jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk	Kelompok	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	SS 3 . Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	SS.2. Hasil riset WPP dan Perairan Umum Daratan (PUD) mendukung sumber daya perikanan berkelanjutan	3	WPP yang terpetakan potensi sumber daya perikanan untuk pengelolaan berkelanjutan pada 11 WPP	Paket	4	4	4	4	4
3	SS 4. Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan (KP) yang meningkat	SS.3 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat	4	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	orang	16.982	17.942	18.801	18.692	19.291
			5	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan)	Orang	193	205	215	225	255

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	NO	IKU	SATUAN	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
4	SS 5. Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	SS.4 Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan	6	Jumlah Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) KP	Paket	10	11	11	11	11
			7	Jumlah Data, informasi dan peta hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan	Paket	11	11	11	11	11
			8	Jumlah Hasil riset yang dimanfaatkan oleh sektor industri	Paket	2	3	3	3	3
			9	Jumlah Rekomendasi hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan	Paket	25	25	29	29	31
5	SS 9. Tata kelola pemerintahan yang baik	SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik	10	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) BRSDM	Indeks	72	72	72	72	72
			11	Persentase Unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	%	82	82	82	82	82
			12	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi BRSDM	Nilai	29	30	31	32	33

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN STRATEGIS BRSDM	NO	IKU	SATUAN	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
			13	Jumlah Unit Kerja BRSDM berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Satker	10	12	14	16	18
			14	Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) BRSDM	Level	3	3	3	3	3
			15	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BRSDM	Nilai	A (86)	A (86)	A (86)	A (86)	A (86)
			16	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRSDM	Nilai	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)
			17	Batas tertinggi persentase nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup BRSDM dibandingkan realisasi anggaran	%	1	1	1	1	1
			18	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup BRSDM	%	60	60	60	60	60

Tabel 8. Indikator Kinerja BPPSDM Tahun 2020-2024 (menjadi)

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN PROGRAM BPPSDM	NO	IKU	SATUAN	TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024 (Semula)	2024 Menjadi)
1	SS-3 yang akan dicapai yaitu “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”	SP-1 SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri	%					75	72
		SP-2 SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)	2	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan)	orang					255	402
		SP-3 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan	3	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk	Kelompok					2000	4000
			4	Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya	Kelompok					1500	2000
		SP-4 Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan,	5	Desa Perikanan Cerdas (<i>Smart Fisheries Village/ SFV</i>)	desa					11	15

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN PROGRAM BPPSDM	NO	IKU	SATUAN	TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024 (Semula)	2024 Menjadi)
		Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat		yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kelautan dan Perikanan							
		SP-5 Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit					-	53
		SP-6 Perumusan Kebijakan KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	8	Hasil Perumusan Kebijakan Responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan	Rekomendasi Kebijakan					31	8
2	SS-7 RB KKP yang berkualitas	SP-7 Tata kelola pemerintahan yang baik	9	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkungan BPPSDM	Unit					18	17

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN PROGRAM BPPSDM	NO	IKU	SATUAN	TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024 (Semula)	2024 Menjadi)
		Lingkup BPPSDM	10	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM	%					1	≤0,5
			11	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM	Indeks					76	79
			12	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM	nilai					A (86)	81
			13	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM	nilai					3	3,3
			14	Persentase Unit kerja BPPSDM yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	%					82	94
			15	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM	%					60	82
			16	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM	%					-	76

NO	SASARAN STRATEGIS RENSTRA KKP	SASARAN PROGRAM BPPSDM	NO	IKU	SATUAN	TARGET					
						2020	2021	2022	2023	2024 (Semula)	2024 Menjadi)
			17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM	nilai					-	93,76
			18	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDM						85	86
			19	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPSDM	%					-	80
			20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPSDM	%					-	80
			21	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	orang					-	5.423

a. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program. Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, BPPSDM telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I A, sebagaimana Lampiran II.

b. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di BPPSDM merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup BPPSDM, sebagaimana Lampiran II.

2. Kerangka Pendanaan

Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Renstra mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020-2024 dan PNPB Tahun 2020-2024. Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana Lampiran II.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 untuk bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia. Dokumen Renstra BPPSDM 2020-2024 dijadikan acuan dan arahan bagi Unit Kerja di lingkup BPPSDM dalam merencanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan periode 2020-2024 secara menyeluruh, integrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Penyusunan Renstra BPPSDM mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Rencana Strategis BPPSDM ini disusun untuk memetakan dan menjawab berbagai persoalan dan tantangan serta dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2020-2024. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi.

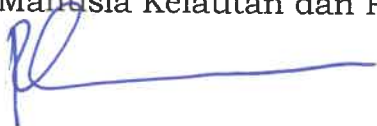
Selanjutnya guna mendukung peran strategis BPPSDM dalam melakukan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan melalui penataan regulasi dan peningkatan sumber daya KP.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN RISET
 DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 NOMOR 8/PER-BRSDM/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
 BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

KERANGKA PENDANAAN
 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2020-2024 (Semula)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Riset dan sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							1,868.1	2.229.0	2.475.9	2.785.0	3,053.2	12,411.2
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							743.8	841.2	885.0	940.9	961.6	4,372,6
Masyarakat Kelautan dan perikanan yang dilatih							52.0	54.5	57.5	60.5	64.8	289.3
	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	25.200	26.000	27.000	28.000	30.000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Masyarakat Kelatan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi							2.1	3.8	4.5	6.0	9.0	25.4
	Jumlah SDM Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi (orang)	3.500	6.250	7.500	10.000	15.000						
Kelompok Palaku Utama/ Usaha yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh KP												
	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (orang)	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000						
Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten							8.8	22.7	24.1	25.5	25.5	106.5
	Jumlah aparatur kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	2.280	3.560	3.760	3.960	3.400						
Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							28.5	38.8	43.7	58.4	68.1	237.5
	Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terstandar (Unit)	7	7	7	7	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diretapkan							2.8	3.4	4.6	6.1	6.7	23.5
	Jumlah percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan (unit)	34	36	48	64	70						
Layanan sarana dan prasarana internal							0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	7.5
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	1	1	1	1	1						
Layanan Pendidikan dan Pelatihan							3.5	6.6	6.6	6.6	6.6	29.8
	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan dukungan manajemen satker							6.1	12.7	12.7	12.7	12.7	56.8
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan perkantoran							549.0	588.4	617.9	648.7	648.7	3.052.8
	Jumlah layanan perkantoran	1	1	1	1	1						
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	527.8	554.2	582.0	611.0	609.3	2.884,3

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Operasional dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	21.2	34.2	35.9	37.7	39.5	168.5
Pendidikan kelautan dan Perikanan							590.8	716.6	769.9	880.4	983.9	3.941.5
Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten							116.8	210.9	243.1	260.0	275.0	1.155.8
	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	8.293	9.173	10.633	12.286	13.115						
Pengabdian pendidikan tinggi							3.9	5.0	7.5	8.0	10.0	34.4
	Jumlah pengabdian aparatur KKP (orang)	17	17	17	17	17						
Pendidikan aparatur KKP							12.7	19.8	21.9	24.6	25.6	104.6
	Jumlah pendidikan aparatur KKP (orang)	195	230	235	240	250						
Sarana dan prasarana pendidikan KP							118.2	136.6	142.7	153.8	160.0	711.3
	Jumlah sarana dan prasaran pendidikan KP (unit)	21	22	22	22	22						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Layanan pendidikan dan pelatihan							4.0	10.7	12.9	14.4	15.9	58.0
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan dukungan manajemen satker							13.3	26.1	28.6	31.7	34.9	134.5
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan perkantoran							271.9	307.5	313.2	387.9	462.5	1.743.0
	Jumlah layanan perkantoran (layanan)	1	1	1	1	1						
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	197.3	215.5	219.3	236.3	253.2	1.121.6
	Operasional dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	74.5	92.0	93.9	151.6	209.3	621.4
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BRSDM KP							71.1	73.1	79.7	87.9	87.9	399,6
Layanan dukungan manajemen Eselon I							28.5	31.2	35.4	42.1	42.1	179.2

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	72	72	72	72	72						
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BRSDM (%)	82	82	82	82	82						
	Nilai Kinerja pelaksanaan reformasi Birokrasi lingkup BRSDM (nilai)	29	30	31	32	33						
	Nilai AKIP (nilai)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)						
	Level Maturitas SPIP (level)	3	3	3	3	3						
	Nilai Kinerja Pelaksaaan Anggaran lingkup BRSDM (nilai)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)	Baik (88)						
	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDMKP dibandingkan	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dengan realisasi anggaran (%)											
Layanan Sarana dan Prasarana Internal							3.5	1.7	1,9	2.1	2.1	11.1
	Tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat BRSDM KP (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan Perkantoran							39.1	40.3	42.5	43.8	43.8	209.3
	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Sekretariat BRSDMKP (bulan)	12	12	12	12	12	13.8	15.8	17.0	18.3	18.3	83.1
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat BRSDMKP (bulan)	12	12	12	12	12	25.3	24.5	25.5	25.5	25.5	126.3
Riset Perikanan							279.2	384.2	512.8	629.9	753.6	2.559.7
Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Perikanan							3.2	3.4	3.9	4.2	4.3	18.8
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan (paket)	15	15	18	20	20						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Data dan/atau informasi stok sumberdaya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP)NRI							20.0	25.0	28.2	30.8	33.5	137.5
	Jumlah data dan/atau informasi stok sumberdaya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) NRI	11	11	11	11	11						
Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di perairan umum daratan (PUD)							4.2	5.0	6.5	8.2	8.2	32.1
	Jumlah data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan umum daratan (PUD)	8	10	12	14	14						
Teknologi hasil riset perikanan							13.2	20.0	22.0	24.0	26.0	105.2
	Jumlah teknologi hasil riset perikanan (paket)	23	30	30	30	30						
Penerapan teknologi adaptif lokasi (TAL) hasil riset perikanan							1.8	2.3	2.8	3.3	3.5	13.6
	Jumlah penerapan teknologi adaptif lokasi (TAL) hasil	3	6	9	9	9						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	riset perikanan (inovasi)											
Sarana dan Prsarana Riset Perikanan							18.7	32.0	39.3	37.0	43.3	170.3
	Jumlah sarana dan prasarana riset perikanan (unit)	10	12	12	12	12						
Produk Biologi Hasil Riset Perikanan							5.9	6.0	6.4	6.7	7.0	31.9
	Jumlah produk biologi hasil riset perikanan (paket)	15	15	16	17	18						
Data dan/atau informasi hasil risey perikanan							4.5	6.1	6.4	6.7	6.9	30.5
	Data dan/atau informasi hasil riset perikanan (paket)	10	11	11	11	11						
Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan							1.1	1.1	1.7	1.7	1.7	7.2
	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan (paket)	2	2	3	3	3						
Produk Riset Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan Siap Guna							1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	6.4
	Jumlah Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan Siap Guna	2	2	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Layanan penelitian dan pengembangan							1.6	2.1	2.6	3.2	3.7	13.1
	Jumlah layanan penelitian dan pengembangan (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan dukungan manajemen satker							8.1	10.4	11.7	12.9	14.2	57.2
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan perkantoran							197.97	270.00	380.00	490.00	600.00	1.935.97
	Jumlah layanan perkantoran	1	1	1	1	1						
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	137.60	200.00	300.00	400.00	500.00	1.537.60
	Operasional dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	58.37	70.00	80.00	90.00	100.00	398.37
Riset Kelautan							115.1	134.8	142.2	156.2	172.0	720.4
Data dan/atau informasi pemetaan sumberdaya kawasan pesisir							3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	25.0
	Jumlah Data dan/atau informasi pemetaan sumberdaya	8	10	10	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kawasan pesisir (kawasan)											
Data dan/atau informasi pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP							1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	10.00
	Jumlah Data dan/atau informasi pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP (paket)	2	2	3	3	3						
Sarana dan prasarana riset kelautan							33.2	43.0	40.2	42.2	48.6	207.2
	Jumlah Sarana dan prasarana riset kelautan (unit)	7	7	7	7	7						
Prototipe alat dan mesin hasil riset dan perekayasaan kelautan							2.0	2.0	3.6	3.6	3.6	14.8
	Jumlah Prototipe alat dan mesin hasil riset dan perekayasaan kelautan (paket)	4	4	6	6	6						
Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna							0.5	0.6	0.8	1.5	1.5	4.9

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna (paket)	1	1	1	2	2						
Rekomendasi kebijakan hasil riset kelautan							1.8	2.8	3.2	4.5	5.0	17.3
	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil riset kelautan (paket)	1	1	2	4	4						
Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan							0.8	0.8	1.6	3.2	3.2	9.6
	Jumlah Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan (paket)	1	1	2	4	4						
Sarana dan prasarana riset data satelit radar							13.9	15.0	18.0	19.0	22.0	87.9
	Jumlah Sarana dan prasarana riset data satelit radar (scene)	500	500	500	500	500						
Sarana dan prasarana stasiun bumi penerima data satelit radar							4.4	5.5	6.5	8.0	8.5	32.9

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Sarana dan prasarana stasiun bumi penerima data satelit radar (unit)	1	1	1	1	1						
Layanan penelitian dan pengembangan							0,5	0.5	0.6	0.6	0.6	2.8
	Jumlah Layanan penelitian dan pengembangan (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan dukungan manajemen satker							2.4	5.6	6.7	8.1	9.0	31.8
	Jumlah Layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
Layanan perkantoran							51.73	53.50	54.00	57.00	60.00	276.23
	Jumlah Layanan perkantoran (layanan)	1	1	1	1	1						
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	26.73	27.50	27.50	27.50	27.50	136.73
	Operasional dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	25.00	26.00	26.50	29.50	32.50	139.50

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan							44.8	51.3	55.6	56.8	58.2	266.7
Rekomendasi kebijakan hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP							1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	7.9
	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP	7	7	7	7	7						
Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan							2.5	3.4	4.4	5.4	6.4	22.1
	Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (paket)	6	6	7	7	7						
Data dan/atau informasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP yang dihasilkan							1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	10.4
	Jumlah Data dab/atau informasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP	5	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	yang dihasilkan (paket)											
Sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan							8.3	10.0	12.0	10.0	8.0	48.3
	Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12	11.64	11.27	12.09	13.01	14.09	62.11
	Operasional dan pemeliharaan kantor (bulan)	12	12	12	12	12	2.13	2.58	2.84	3.12	3.41	14.09

KERANGKA PENDANAAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020-2024 (Menjadi)

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Kerja
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.471.584	
Program Dukungan Manajemen			1.098.289	
Sasaran Program 10	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPSDM		1.098.289	BPPSDM
	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkungan BPPSDM (Unit)	16		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5		
	Indeks profesionalitas ASN BPPSDM (Indeks)	79,00		
	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)	77,00		
	Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDM (Nilai)	3,30		
	Persentase unit kerja BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPSDM (%)	76,00		
	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDM (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran BPPSDM (Nilai)	86,00		
	Tingkat kepatuhan BMN BPPSDM (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup BPPSDM (%)	80,00		
	Pendidikan dan pelatihan aparatur (Orang)	5423		

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Kerja
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			1.084.289	Sekretariat BPPSDM
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya layanan dukungan manajemen di lingkungan BPPSDM			
	Indeks profesionalitas ASN BPPSDM (Indeks)	79,00		
	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkungan BPPSDM (Unit)	16		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK BPPSDM (%)	≤0,5		
	Penilaian mandiri SAKIP BPPSDM (Nilai)	77,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP BPPSDM (Nilai)	3,30		
	Persentase unit kerja BPPSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di Lingkup BPPSDM (%)	76,00		
	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDM (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran BPPSDM (Nilai)	86,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPSDM (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPSDM (%)	80,00		
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana BPPSDM tepat waktu (%)	100,00		
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Layanan Perkantoran			
	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup BPPSDM tepat waktu (%)	100,00		

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Kerja
	Persentase pemenuhan layanan perkantoran BPPSDM tepat waktu (%)	100,00		
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP			14.000	Pusat Pendidikan KP Pusat Pelatihan KP
Sasaran Kegiatan	Jumlah aparatur yang dididik dan dilatih			
	Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)	190		
	Aparatur KKP yang diberikan izin belajar (Orang)	68		
	Aparatur KKP yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Diklat) (Orang)	5165		
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			1.000	BBRSEKP
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			
	Rekomendasi kebijakan responsif sosial ekonomi kelautan dan perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	8		
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			372.295	BPPSDM
Sasaran Program	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri			
	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di Dunia usaha dan Dunia Industri/DUDI (%)	72,00		
Sasaran Program	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)			
	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) (Orang)	392		
Sasaran Program	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dikembangkan			

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Kerja
	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3000		
	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	2000		
Sasaran Program	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan KP yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat			
	Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village/SFV) yang Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Kelautan dan Perikanan	15		
Sasaran Program	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Ditingkatkan kapasitasnya			
	Sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	53		
Pendidikan Kelautan dan Perikanan			199.000	Pusat Pendidikan KP
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten			
	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8020		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi KP			
	Pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan (Kelompok Masyarakat)	14		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi KP			
	Penelitian terapan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan (Kajian)	23		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP yang Terstandar			
	Peralatan dan mesin pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	21		

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Kerja
	prasarana pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	9		
	prasarana pendidikanengah kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3		
	sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	9		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan KP			
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan Perikanan (NSPK)	5		
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			173.295	Pusat Penyuluhan KP Pusat Pelatihan KP
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan			
	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (Orang)	35173		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan			
	Masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat Kompetensi (Orang)	1450		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP			
	Kajian inovasi yang diterapkan untuk pelatihan kelautan dan perikanan (Kaji Terap)	8		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan yang disuluh (Kelompok)	47000		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP			
	Inovasi yang diterapkan untuk penyuluhan kelautan dan perikanan (Kelompok masyarakat)	49		

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam juta rupiah)	Unit Kerja
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
	Sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	11		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP			
	Norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan (NSPK)	8		

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Rudi Alek Wahyudin